

Fraud Triangle Theory Dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dengan Moderasi Sistem Pengandalian Internal

¹**Evi Yuli Susanti** (Rumah Sakit Onkologi Surabaya)
E-mail: eviyulisusanti@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

²**Farah Nur Fauziah** (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: farahnurfauziah@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

³**Nur'aini** (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: nuraini@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

Kata Kunci: fraud triangle, kualitas manajemen keuangan, sistem pengendalian internal

Keywords: fraud triangle, financial management quality, internal control system

Received : 30 Februari 2021

Revised : 12 Maret 2021

Accepted: 29 Maret 2021

©2021The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).



ABSTRAK

Manajemen keuangan daerah adalah elemen kunci dalam pemerintahan yang baik. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah adalah bentuk manajemen laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dapat menunjukkan kinerja pemerintah yang selalu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fraud triangle theory pada kualitas manajemen keuangan dengan sistem kontrol internal sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data sampel dari 100 karyawan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang, Jawa Timur, dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria. Analisis data menggunakan teknik path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, peluang, rasionalisasi mempengaruhi kualitas manajemen keuangan. Sedangkan sistem pengendalian internal tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh tekanan, peluang, rasionalisasi terhadap kualitas manajemen keuangan.

ABSTRACT

Regional financial management is a key element in good governance. The preparation of financial statements based on government accounting standards is a form of quality financial statement management. It can shows the performance of government that always realizes transparency and accountability of local governments. This study aims to examine the effect of fraud triangle theory on the quality of financial management with an internal control system as a moderating variable. This study uses quantitative methods and data

samples of 100 employees in the Regional Apparatus Organization (Organisasi Perangkat Daerah -OPD) Malang City, East Java, with a purposive sampling technique based on criteria. Data analysis using Path Analysis techniques. The results showed that pressure, opportunity, rationalization affect the quality of financial management. While the internal control system is not able to strengthen or weaken the influence of pressure, opportunity, rationalization to the quality of financial management.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya. (Lamusu, 2013 :17).

Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dapat dikatakan bernilai apabila dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan pemerintah yang informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta pertanggungjawaban. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini dijadikan pedoman oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan penilaian setiap tahun terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Perolehan opini WTP yang diraih 7 kali berturut-turut oleh pemerintah Kota Malang merupakan

kerja profesional semua perangkat di pemerintah Kota Malang sebagai bentuk keseriusan, ketekunan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun disisi lain perolehan opini belum mencerminkan realita yang sebenarnya, realitas yang terjadi pada kurun waktu berjalan terjadi kasus korupsi Wali Kota Malang yang melibatkan mayoritas anggota DPRD Kota Malang. Modus dalam kasus ini adalah uang pokok pikiran sebesar Rp 700 juta untuk rencana proyek Jembatan Kedungkang kepada Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono untuk pembahasan APBD perubahan 2015 yang melibatkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Mochammad Anton.

Hasilnya proyek multiyears senilai Rp 98 miliar yang diajukan pemkot pun diloloskan dewan. Selain suap, KPK juga menduga seluruh anggota DPRD Kota Malang menerima gratifikasi lainnya total senilai Rp 8,5 miliar. Serta ‘uang sampah’ sebesar Rp 300 juta yang dibagikan pada semuanya untuk memuluskan proyek perluasan lahan pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill di TPA Supit Urang. Sesuai rencana kerja anggaran (RKA) APBD-Perubahan tahun 2015 dialokasikan belanja sebesar Rp 2.132.444.361.610,00 naik Rp 329.297.235.096,00 dari APBD induk tahun 2015 yang dialokasikan sebesar Rp 1.803.147.126.513,79. persengkongkolan ini dilakukan secara sembunyi-sembuni yang bertujuan untuk pemulusan pengesahan APBD-perubahan tahun anggaran 2015 oleh DPRD dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) Tim Anggaran Pemkot Malang.

Akibat kejadian tersebut roda pemerintahan khususnya dalam fungsi legislatif di kota Malang lumpuh karena hanya tersisa 5 anggota dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sehingga agenda pembahasan APBD Perubahan 2018, Rancangan APBD 2019, pelantikan Wali Kota Malang terpilih periode 2018-2023, pengesahan sejumlah rancangan peraturan daerah tidak bisa dilakukan. Jelas ini menunjukkan kontradiksi atas diraihnya prestasi pengelolaan keuangan daerah selama 7 tahun berturut turut. Prestasi dan korupsi adalah dua pemaknaan yang berbeda, di era keterbukaan sekarang masyarakat harus lebih selektif dalam melihat dan mengawasi keterbukaan anggaran di daerah masing masing, agar dalam pengelolaannya tidak disalah artikan oleh segelintir orang saja yang mengakibatkan rusaknya budaya pemerintahan.

Dengan adanya ini seharusnya dijadikan pembelajaran oleh para stakeholder dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat memberikan evaluasi yang baik, sehingga masyarakat mampu mendapatkan informasi dan dampak yang baik dari adanya pengelolaan keuangan daerah. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diataranya terdapat dalam 3 elemen fraud triangle yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi serta sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

Incentive/pressure diasumsikan adanya tekanan yang mendorong seseorang untuk bertindak curang (Wolfe Hermanson, 2004). Pada sebuah organisasi pemerintah, tekanan itu muncul dari berbagai hal diantaranya tekanan akan kebutuhan yang tidak tercukupi dari adanya kompensasi yang diberikan Montgomery et al., (2002) opportunity (kesempatan) yaitu peluang

yang menyebabkan pelaku secara leluasa menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, sikap apatis. Rationalization diasumsikan pada kesadaran seseorang bahwa perilaku fraud ini bernilai risiko (Wolfe Hermanson 2004). Rationalization terjadi karena pelaku fraud mencari pbenaran atas aktivitas yang mengandung fraud.

Melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga ke depan dapat memperoleh opini WTP berarti opini tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengembalian keputusan oleh para pemaku kepentingan (stakeholders). Selain itu, sistem pengendalian intern (SPI) yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2012).

Dan pengujian Fraud Triangle Theory masih relevan untuk menjadi kajian dalam mengembangkan faktor-faktor kecurangan. Alasan ini menjadi motivasi untuk melakukan penelitian dengan menguji secara empiris fraud triangle theory (tekanan, kesempatan, rasionalisasi) dalam mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan, dengan moderasi sistem pengendalian internal pada Pemerintahan Kota Malang.

Telaah Pustaka Dan Pengembangan

Fraud triangle Theory

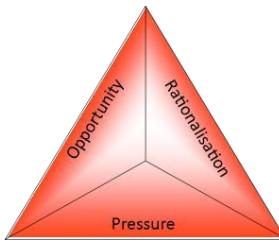
Teori fraud triangle ini merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Donald R. Cressey (1953) diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS No. 99, yang dinamakan fraud triangle atau segitiga kecurangan. Dalam Tuanakotta (2010: 205) Donald R Cressey menyebutkan tiga elemen penyebab terjadinya kecurangan yang disebut dengan triangle, ketiga elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pressure (tekanan) yaitu adanya insentif tekanan kebutuhan untuk melakukan Fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. faktor non keuangan tersebut meliputi; kedudukan, kegagalan pribadi, kegagalan bisnis, keterpurukan dalam kesendirian, kebiasaan buruk, dan kekesalan kebencian. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada pressure yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu financial stability, external pressure, personal financial need, financial targets.
2. Opportunity (kesempatan) yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan

dan penyalahgunaan wewenang. Opportunity akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan. Satu-satunya faktor penyebab kecurangan yang dapat dikendalikan adalah opportunity. Seseorang yang karena tekanan atau rasionalisasi mungkin akan melakukan kecurangan jika ada kesempatan.

3. Rationalization (rasionalisasi) yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan sehingga membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud dengan cara mencari pbenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Rasionalisasi diperlukan untuk melawan hukum demi mempertahankan jati diri pelaku kecurangan.

Dari ketiga elemen yang disebutkan oleh Donald R.Cressey di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. *Fraud Triangle Theory*

Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain:

1. Relevan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kefektifan Sistem Pengendalian Internal

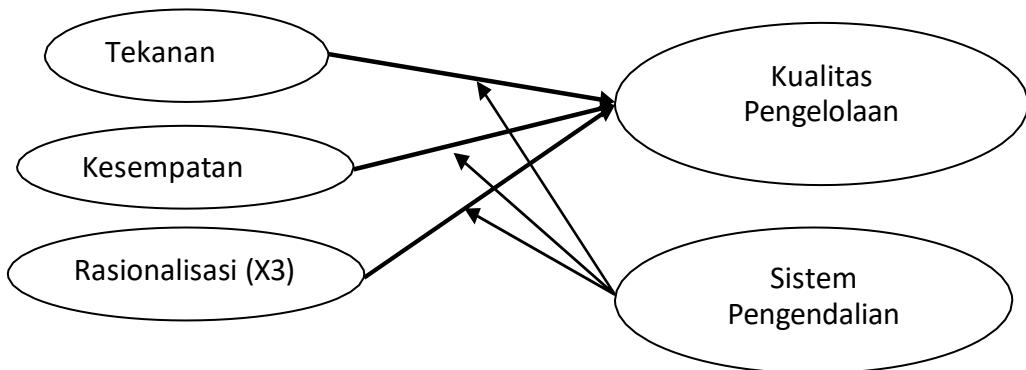
Menurut COSO (Comitee of Sponsoring Organization), pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling terkait yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (control environment) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua pengendalian internal, menyediakan disiplin struktur.
2. Penaksiran risiko (risk assessment) adalah identifikasi entitas analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Standar Pengendalian (control activities) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi komunikasi (information and communication) adalah pengidentifikasi, pengungkapan, pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Pemantauan (monitoring) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu, pengambilan tindakan koreksi

Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka Konseptual

Model ini menggambarkan pengaruh elemen fraud triangle theory yang terdiri dari tiga elemen yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi terhadap variabel dependen kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating.



Gambar .2 Kerangka Konseptual

Pengaruh Tekanan Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian Mia Tri Puspitaningrum (2019) menyatakan bahwa variabel tekanan eksternal dengan proksi leverage berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Insentif menjadi faktor yang membuka peluang untuk melakukan penipuan (Ruankaew, 2016). Kompensasi juga menjadi komponen tekanan yang tercermin pada kepuasan kompensasi yang

mampu mempengaruhi tindakan kinerja pegawai sehingga dapat menentukan kualitas pengelolaan keuangan (Kurrohman dkk, 2017; Azmi, 2017). Kompensasi yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap para aparatur pemerintah desa menjadi tekanan yang mempengaruhi kecurangan yang tercermin pada pencapaian kinerja (Wonar, 2018).

H1: Tekanan berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan.

Pola-pola Manajemen Laba

Elemen kesempatan merupakan kelemahan dalam sistem, dimana seseorang yang tepat bisa mengeksplorasi sebuah penipuan (Wolfe Hermanson 2004). Kesempatan terhadap tindakan kecurangan dapat terjadi karena: a) sistem pengendalian internal yang lemah, yang mengakibatkan susahnya penelusuran, ketidakcukupan dan inefisiensi aktivitas pengendalian pada resiko proses bisnis sehingga tidak mampu mengatasi kompleksitas organisasi, kebijakan prosedur SDM; b) tata kelola organisasi yang buruk, pengawasan dari pihak komite audit atau independen tidak berjalan semestinya dikarenakan independensi yang terganggu; c) gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku kecurangan. Ruankaew (2016) menyatakan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi dapat disebabkan oleh pegawai yang memanfaatkan kesempatan. Kesempatan timbul karena seseorang memanfaatkan situasi tertentu, dan pengelolaan organisasi yang kurang memadai dapat menjadi kesempatan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan yang menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan (Chandra, 2015).

H2: Kesempatan berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Rationalization diasumsikan pada kesadaran seseorang bahwa perilaku fraud ini bernilai risiko (Wolfe Hermanson 2004). Hal ini dimaknai dengan persepsi pegawai tentang tindakan, pola tingkah laku, kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi seluruh pegawai yang berada didalam instansi. Budaya menjadi salah satu komponen yang membentuk rasionalisasi yang baik dan buruknya dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan organisasi (Mustikasari, 2013).

H3: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal Dalam Memoderasi Hubungan Antara Tekanan Dengan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Tekanan dapat mendorong seseorang untuk bertindak curang (Hermanson, 2004). Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi; kehandalan pelaporan keuangan; ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. Untuk mencapai

suatu laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik perlu didukung oleh pengendalian internal yang baik pula, karena salah satu tujuan pengendalian internal adalah dapat dipercayanya akuntansi (keandalan laporan keuangan) (Kustiawan, 2016).

H4: Sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara tekanan dengan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal Dalam Memoderasi Hubungan Antara Kesempatan Dengan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Opportunity diasumsikan pada kesempatan yang dimiliki oleh pegawai karena adanya kelemahan dalam sistem, dimana seseorang yang tepat bisa mengeksplorasi sebuah penipuan (Hermanson 2004). Kustiawan (2016) menyatakan bahwa pengaruh pengendalian intern dan tindak lanjut temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan yang berimplikasi terhadap pencegahan fraud hasilnya kualitas laporan keuangan di pengaruhi oleh pengendalian intern yaitu tidak mungkin laporan keuangan memiliki kualitas yang baik tanpa memiliki pengendalian intern yang baik pula, karena salah satu tujuan pengendalian intern adalah dapat dipercayanya akuntansi.

H5: Sistem pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara kesempatan dengan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variaabel independen terhadap variaabel dependen. Sumber data berasal dari pejabat pengelola keuangan di SKPD Pemerintah Kota Malang yang digali melalui kuesioner sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer. Penelitian ini menggunakan polupasi 500 pegawai yang ada di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Malang pada bulan April tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu mengambil sampel dengan kriteria adalah pejabat pengelola keuangan antara lain :1) sebagai pengguna Anggaran; 2) penatausahaan Keuangan; 3) bendahara Pengeluaran, dan diperoleh 100 responden.

Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP diukur dengan skala likert 1-5, dan menggunakan lima indikator yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yaitu: relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini 3 elemen fraud triangle theory yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Tekanan diproksikan indikator

kepuasan kompensasi, keadilan organisasi, tekanan situasional berupa otoritas atasan. Kesempatan diproksikan indikator keefektifan pengendalian internal, penegakan hukum/aturan. rasionalisasi diproksikan indikator budaya organisasidan komitmen organisasi.

Variabel Moderating

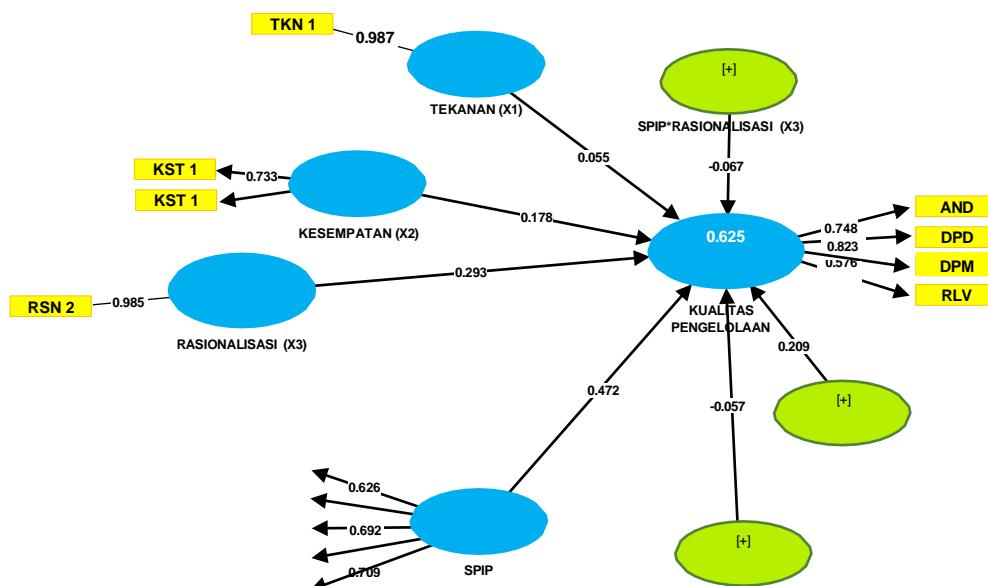
Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal. sistem pengendlian internal merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.Selain itu menjamin bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAP dan meningkatkan efsien dan efektivitas organisasi. Variabel moderasi diukur dengan indikator berikut: 1) lingkungan pengendalian; 2) penaksiran resiko; 3) standar pengendalian; 4) informasi komunikasi; dan 5) pemantauan. Indikator-indikator ini juga diukur menggunakan skala Likert dengan gradasi angka 1-5

Teknik Analisis Data

Analisis terhadap evaluasi model pada penelitian ini menggunakan program Partial Least Squares (PLS). Evaluasi model dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu pengujian terhadap validitas konvergen, pengujian terhadap validitas diskriminan, serta pengujian terhadap reabilitas. Pada tahap terakhir dilakukan pengujian model struktural (inner model).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria convergent validity, discriminant validity dan reliabilitas telah didapatkan model yang ideal sesuai dengan kerangka konseptual penelitian, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural (inner model).



Gambar .3 Model Struktural

Tabel .1 Nilai R-Square

Variabel	R-Square
Kualitas Pengelolaan keuangan (Y)	0.625

Berdasarkan gambar 2 dan tabel 1 diperoleh nilai R-Square pada model sebesar 0.625, artinya variabel kualitas pengelolaan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel konstruk (Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, sistem pengendalian internal, efek moderasi 1 (Sistem Pengendalian Internal*Tekanan), efek moderasi 2 (Sistem Pengendalian Internal*Kesempatan), efek moderasi 3 (Sistem Pengendalian Internal*Rasioanalisis) sebesar 62,5% sedangkan sisanya sebesar 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

Tabel .2 Path koefisien dan P value

Eksogen	Endogen	Path Analisis	P Value	Keterangan
Tekanan (X1)	Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0.055	0.045	Diterima
Kesempatan (X2)	Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0.178	0.037	Diterima
Rasionalisasi (X3)	Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0.293	0.010	Diterima
SPI*Tekanan	Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y)	-0.057	0.659	Ditolak
SPI*Kesempatan	Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y)	0.209	0.051	Diterima
SPI*Rasionalisasi	Kualitas Pengelolaan Keuangan (Y)	-0.067	0.517	Ditolak

Pengaruh tekanan terhadap kualitas pengelolaan keuangan

Hasil uji statistik pada tabel 2 terlihat nilai path coefficients memiliki pengaruh tekanan terhadap kualitas pengelolaan keuangan adalah sebesar 0.055 dan signifikan 0.045 lebih kecil dari $p<0,05$ atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan diterima hal ini menunjukkan bahwa tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sehingga dapat disimpulkan kepuasan kompensasi sebagai indikator tekanan dapat meningkatkan tindakan kecurangan aparatur di Pemerintah Kota Malang dan berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan. Hal ini konsisten sebagaimana dikemukakan oleh Wonar (2018) bahwa kepuasan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap

kecurangan di Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang. Kompensasi yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap para aparatur pemerintah desa yang terdapat di Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan pencapaian kinerja.

Pengaruh kesempatan terhadap kualitas pengelolaan keuangan

Hasil uji statistik pada tabel 2 nilai path coefficient sebesar 0.178 dengan p-value 0.037 atau lebih kecil $p<0,05$ atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Dapat disimpulkan sistem pengendalian internal dan penegakan aturan sebagai indikator kesempatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ruankaew (2016) bahwa peluang membuka pintu untuk penipuan, insentif dan rasionalisasi dapat menarik orang ke arah itu. Juga konsisten seperti yang disampaikan oleh Chandra (2015) bahwa organisasi perlu membangun sebuah pengendalian atau pengawasan yang baik sehingga karyawan tidak dapat melakukan kecurangan, dapat mendekripsi dengan cepat dan tepat apabila terjadi kecurangan.

Pengaruh rasionalisasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan

Hasil uji statistik pada tabel 2 nilai path coefficients sebesar 0.293 dengan p-value 0.010 atau lebih kecil dari $p<0,05$ atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan di terima. Hal ini berarti semakin tinggi rasionalisasi yang ditunjukkan dari komitmen pada organisasi mampu mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan. Dapat disimpulkan semakin tinggi loyalitas pegawai maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan yang berimplikasi pada penurunan tindakan kecurangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Aini (2017) bahwa variabel rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa.

Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi Tekanan Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan

Hasil uji statistik pada tabel 2 nilai path coefficients sebesar -0.057 dengan p-value 0.569 atau lebih besar dari $p>0,05$ atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan di tolak. Hal ini berarti keberadaan sistem pengendalian internal tidak mampu memperkuat ataupun melemahkan pengaruh faktor tekanan terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Dapat disimpulkan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi tidak dapat meningkatkan hubungan tekanan terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Mokoginta (2017) bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Mongondow utara.

Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi Kesempatan Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan

Hasil uji statistik pada tabel 2 nilai path coefficients sebesar 0.209 dengan p-value 0.051 sehingga hipotesis yang diajukan di terima. Hal ini menunjukkan sistem pengendalian internal dapat memoderasi kesempatan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sehingga dapat disimpulkan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dapat meningkatkan hubungan kesempatan

terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rusvianto (2018) penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi Rasionalisasi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan

Hasil uji statistik pada tabel 2 nilai path coefficients sebesar -0.067 dengan p-value 0.517 atau lebih besar dari $p>0,05$ atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan di tolak. Hal ini menunjukkan sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam memoderasi hubungan antara rasionalisasi dengan kualitas pengelolaan laporan keuangan pada pemerintah Kota Malang sehingga dapat disimpulkan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan hubungan rasionalisasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Budiawan (2014) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi, dapat ditarik beberapa simpulan antara lain :

1. Tekanan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan karena kompensasi yang diberikan belum sesuai dengan pencapaian kinerja sehingga kepuasan kompensasi sebagai indikator tekanan dapat meningkatkan tindakan kecurangan
2. Kesempatan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan karena sistem pengendalian internal sudah efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
3. Rasionalisasi berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan karena loyalitas pegawai berjalan dengan baik sehingga berimplikasi pada penurunan tindakan kecurangan
4. Sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam memoderasi tekanan terhadap kualitas pengelolaan keuangan
5. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh dalam memoderasi kesempatan terhadap kualitas pengelolaan keuangan
6. Sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam memoderasi hubungan antara rasionalisasi dengan kualitas pengelolaan keuangan.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan melalui media elektronik (E-Governance), serta perlu adanya keseimbangan antara komitmen organisasi sebagai bentuk loyalitas dengan penyetaraan pemberian kompensasi. Sedangkan saran untuk penelitian

yang akan datang adalah: 1) adanya teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui website di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, tidak perlu datang ke setiap OPD; dan 2) peneliti yang akan datang dapat mengembangkan fraud triangle theory dengan diamond theory dan pentagon theory.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA, SAS No. 99. (2002). Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit, AICPA. New York.
- Aini, Nurul. (2017). Pengaruh perspektif fraud diamond terhadap Kecenderungan terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa. (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017).
- Amanda, Aditya Pane. (2018). Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah terhadap kecurangan. Jurnal Akuntansi Bisnis 4 (2) November 2018.
- Association of Certified Fraud Examinations (ACFE). (2000). ACFE Reports The Nations 2000.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.(2012). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- Cahyo, Febrian. (2015).Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan.Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2015
- Chandra, Devia Prapnala Sukardi Ikhsan. (2015). Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) Pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobogan. *Accounting Analysis Journal* 4 (3). ISSN 2252-6765.
- COSO.(2002). Guidance on Monitoring Internal Control Systems, The American Institute of Certified Public Accountant.
- Cressey, D. (1953). Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. Journal of Corporate Governance and Firm Performance. Vol. 13 h. 53-81.
- Faishol, Ahmad. (2016). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Kualitas laporan keuangan. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi Volume I No. 3.
- Ghozali.(2011). Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

- Gloria, Sinambow dkk. (2017). Pengaruh kualitas pengelola keuangan sistem Pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Pada inspektorat pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1).
- Korupsi massal di Malang 10 Oktober 2018. Melalui <http://www.detik.com> Kronologi.
- Korupsi Massal DPRD Kota Malang 06 Sep 2018. Melalui <http://www.Liputan6.com>.
- Kurrohman, Lailiyah, Wahyuni. (2017). Determinant of Fraudulent in Government: An Analysis in Situbondo Regency, East Java, Indonesia. *Journal of Economics and Management* 11 (S1). 133 – 140.
- Kustiawan, Memen. (2016). Pengaruh pengendalian intern tindak lanjut Temuan audit terhadap kualitas laporan keuangan Yang berimplikasi terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi/Volume XX*, No 03.
- Laporan Tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2018. Melalui www.surabaya.bpk.go.id
- Mokoginta, Novtania dkk. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017.
- Montgomery, D., M. Beasley, S. Menelaides and Z. Palmrose.(2002). Auditors' New Procedures for Detecting Fraud. *Journal of Accountancy*, May 2002: 63-66.
- Mustikasari, Dhermawati Putri. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*. 2(3).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ristianingsih, Ika (2017). Telaah konsep fraud diamond theory dalam Mendeteksi perilaku fraud di Perguruan Tinggi. Call For Paper Ekonomi Bisnis (EBIS 2017)
- Ruankaew, Thanasak. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, Vol 7(1).

- Rusvianto, Dimas dkk. (2018). Pengaruh pelaksanaan Sistem pengendalian internal Pemerintah kompetensi sumber Daya manusia Terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah. Jurnal BanqueSyar'i Vol. 4 No 1.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2010). Akuntasi Forensik dan Audit Investigatis, Edisi II. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Wolfe, D. T., Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. The CPA Journal, Vol. 74 Issue 12, p38.
- Wonar, Klara. 2018. Pengaruh kompensasi dan kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan Keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap Pencegahan frauddengan moral sensitivitysebagai variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Volume 1, Nomor 2, November 2018
- Yamin, Sofyan. 2011. Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling. Jakarta: Salemba Infotek.
- Yesiariani, Merissa. (2017). Deteksi financial statement fraud: Pengujian dengan fraud diamond. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol. 21 No. 1.